

Representasi bendera One Piece sebagai simbol protes di media sosial indonesia: Analisis wacana kritis

Moh Faiz

Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fmoh37621@gmail.com

Kata Kunci:

One Piece, bendera Jolly Roger, fandom activism, critical discourse analysis, protes digital, efek Streisand, kebebasan berekspresi, Indonesia 2025

Keywords:

One Piece, Jolly Roger flag, fandom activism, critical discourse analysis, digital protests, Streisand effect, freedom of expression, Indonesia 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi bendera Jolly Roger bertopi jerami dari serial One Piece menjadi simbol protes politik dan perlawanan sipil di media sosial Indonesia sepanjang tahun 2025. Dengan menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis (Fairclough), Teori Representasi (Hall), dan konsep Fandom Activism, studi ini mengungkap bagaimana warganet—terutama generasi Z dan komunitas penggemar—melakukan re-signifikasi simbol fiksi tersebut sebagai metafora kreatif penolakan terhadap ketidakadilan ekonomi, pembungkaman kritik, serta kecenderungan otoritarianisme. Melalui strategi multimodal (meme, GIF Gear 5, filter AR, duet TikTok, thread viral, dan hashtag seperti #SeruanBendera serta #OnePieceRevolution), simbol ini berhasil menyebar secara masif lintas platform, menciptakan gelombang fandom activism berskala nasional hingga transnasional. Upaya represi negara berupa razia, penyitaan bendera, dan narasi “anti-Pancasila” justru memunculkan efek Streisand yang signifikan, memperkuat legitimasi simbol serta menarik perhatian dan kecaman dari Human Rights Watch serta Amnesty International. Fenomena “Seruan Bendera” 2025 ini menegaskan bahwa budaya populer global memiliki daya politik luar biasa ketika diartikulasikan ulang oleh generasi muda dalam ruang digital, sekaligus menjadi bukti baru bahwa represi simbolis di era media sosial cenderung menjadi bumerang bagi kekuasaan.

ABSTRACT

This study examines the transformation of the straw-hatted Jolly Roger flag from the One Piece series into a symbol of political protest and civil resistance on Indonesian social media throughout 2025. Using the Critical Discourse Analysis (Fairclough) approach, Representation Theory (Hall), and the concept of Fandom Activism, this study reveals how netizens—especially generation Z and fan communities—re-signify these fictional symbols as creative metaphors for rejection of economic injustice, silencing criticism, and authoritarianism. Through multimodal strategies (memes, Gear 5 GIFs, AR filters, TikTok duets, viral threads, and hashtags such as #SeruanBendera and #OnePieceRevolution), this symbol has managed to spread massively across platforms, creating a wave of fandom activism on a national and transnational scale. State repression efforts in the form of raids, confiscation of flags, and “anti-Pancasila” narratives have actually produced a significant Streisand effect, strengthening the legitimacy of the symbol and attracting attention and condemnation from Human Rights Watch and Amnesty International. The phenomenon of the “Flag Call” 2025 confirms that global popular culture has extraordinary political power when rearticulated by the younger generation in the digital space, as well as new evidence that symbolic repression in the social media era tends to backfire on power.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi berkembang pesat dan memengaruhi gaya hidup masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, dan TikTok menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, sekaligus membentuk identitas digital (Barboza & Jasmontaite-Zaniewicz, 2024). Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada pola komunikasi, tetapi juga pada ranah budaya populer dan sastra, di mana karya-karya hiburan kini berfungsi sebagai media penyampaian pesan moral, nilai sosial, serta sarana kritik terhadap ketimpangan dan kekuasaan.

Budaya populer sering kali melampaui perannya sebagai hiburan dan merambat ke dalam ranah ekspresi politik. Munculnya Fandom activism menjadi bukti bahwa komunitas penggemar bukan hanya mengonsumsi produk budaya, tetapi juga dapat membentuk gerakan bersama dan menyalurkan aksi kolektif yang memiliki muatan politik dan sosial (Saka et al., 2024). Dengan begitu, praktik-praktik ini, menimbulkan konvergensi antara identitas budaya (fan) dan partisipasi sipil. Kajian mengenai relasi antara Fandom aktivisme menegaskan bahwa konten populer menyediakan ruang makna dan emosi yang kemudian dapat dimobilisasi ke dalam tindakan nyata (Driessen et al., 2024). Dalam konteks ini, (Zaman, 2023) memperingatkan bahwa fenomena “flexing politik” yang sering muncul di ruang populer justru dapat mereduksi esensi partisipasi politik karena lebih menonjolkan pencitraan daripada substansi, sehingga partai politik perlu menjauhinya agar tidak terjebak dalam budaya politik yang dangkal.

Salah satu contohnya adalah serial anime One Piece, yang mengisahkan perjalanan bajak laut mencari harta karun legendaris. Simbol “Jolly Roger” (bendera one Piece bergaya topi jerami) adalah motif fiksi dari manga/anime yang berfungsi sebagai identitas dalam alur cerita, tetapi kemudian diadopsi dan representasikan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dalam ranah sosial, politik, maupun ekonomi (CNN, 2025). Simbol ini belakangan muncul dalam bentuk demonstrasi dan aksi publik di Indonesia, sehingga ia berubah dari identitas fandom menjadi tanda perlawanan publik (Reuters, 2025; Time, 2025).

Adopsi simbol tersebut memicu masalah interpretatif. Sebagian masyarakat menilai tindakan ini sebagai ekspresi kreatif dan bentuk kritik bermakna (representasi perlawanan terhadap ketidakadilan), namun di sisi lain, ada yang menilai penggunaan simbol tersebut sebagai tindakan yang berpotensi menyinggung semangat kebangsaan atau bahkan di anggap tidak pantas pada momen kenegaraan sehingga menimbulkan kontroversi publik dan tanggapan yang beragam. Lebih lanjut, tindakan penertiban dan kritik terhadap penggunaan simbol tersebut bahkan mendapat perhatian organisasi HAM International yang mengingatkan tentang perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. (Human Rights Watch, 2024).

Kajian mengenai media sosial sebagai arena resistensi telah banyak dilakukan. Suhardi (2024) memaparkan bagaimana media sosial di era digital berfungsi sebagai alat counter-hegemony dan sarana perlawanan masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial. Sejalan dengan itu, (Earl et al., 2022) menjelaskan bahwa ruang digital bukan hanya menjadi arena mobilisasi sosial, tetapi juga menjadi medan represi

dan perlawanan terhadap kekuasaan..Lebih lanjut, (Haslem, 2022) melalui studi etnografi, mengungkapkan bahwa kreator di TikTok menggunakan strategi multimodal sebagai bentuk aktivisme dan ekspresi perlawanan yang kreatif. Dari beberapa kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai resistensi digital umumnya berfokus pada aspek mobilisasi, ekspresi, dan dampak psikologis aktivisme, namun masih terbatas dalam mengkaji bagaimana simbol-simbol budaya populer digunakan sebagai medium resistensi dalam ruang wacana digital, khususnya di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari munculnya bendera One Piece sebagai simbol protes di media sosial Indonesia. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana warganet membangun dan menampilkan makna protes melalui simbol tersebut. Fokus pertama adalah melihat bagaimana bendera One Piece direpresentasikan sebagai bentuk perlawanan dalam unggahan dan percakapan digital. Fokus kedua adalah menelusuri strategi linguistik dan visual yang digunakan warganet, seperti pilihan kata, metafora, gambar, atau meme yang mendukung makna protes. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana beragam cara masyarakat menafsirkan simbol ini dapat menimbulkan kontroversi dan menarik perhatian publik. Rumusan ini membantu mengungkapkan bagaimana sebuah simbol budaya populer bisa berubah menjadi alat kritik sosial dalam ruang digital.

Penelitian ini menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) sebagai landasan teoretis utama untuk menelaah bagaimana praktik bahasa di media sosial merepresentasikan dan menegosiasikan relasi kekuasaan melalui simbol budaya populer. Pendekatan CDA (Fairclough, 1996) memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami keterkaitan antara teks, praktik wacana, dan konteks sosial yang melingkupinya. Sebagai penguat konteks sosial-budaya, penelitian ini juga mengacu pada Teori Representasi (Hall, 2020), yang menjelaskan bagaimana makna sosial dikonstruksi melalui simbol dan media, serta konsep Fandom Activism (Saka et al., 2024) yang menyoroti transformasi komunitas penggemar menjadi agen partisipasi sosial dan politik. Dengan demikian, ketiga kerangka ini saling melengkapi dalam mengungkapkan bagaimana simbol bendera One Piece beroperasi sebagai bentuk representasi dan resistensi di ruang wacana digital Indonesia.

Pembahasan

Representasi Bendera One Piece Sebagai Simbol Protes Di Media Sosial

Transformasi makna dari simbol fandom menjadi simbol resistensi publik

Dalam narasi kanon One Piece karya Eiichiro Oda, bendera Jolly Roger bertopi jerami pada awalnya hanya berfungsi sebagai penanda identitas kru Bajak Laut Topi Jerami sekaligus simbol pemberontakan terhadap otoritas absolut World Government dan Tenryubito (Aqil & Atmojo, 2025). Bendera tersebut secara eksplisit dikaitkan dengan nilai-nilai kebebasan, persahabatan, dan penolakan terhadap sistem hierarkis yang menindas. Makna ini, meskipun bersifat fiksi, mengandung potensi politik yang inheren karena terus-menerus memposisikan “bajak laut” sebagai pihak yang melawan kekuasaan korup dan tidak sah. Transformasi simbol fandom menjadi alat politik ini bukan kasus pertama di Indonesia; (Nadia & Wafiroh, 2022) telah menunjukkan

bagaimana penggemar K-Pop mampu mengorganisir diri di media sosial untuk tujuan kolektif, yang kemudian menjadi preseden bagi fenomena One Piece sebagai fandom activism pada 2025

Konteks Sosial yang memicu representasi

Pada periode Agustus–September 2025, bendera Jolly Roger mengalami proses re-signifikasi yang cepat dan masif di Indonesia akibat konteks sosial-politik yang sarat ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi, pembungkaman kritik, dan persepsi adanya praktik otoritarianisme (Reuters, 2025; CNN, 2025). Melalui mekanisme yang dijelaskan Stuart Hall sebagai “artikulasi ulang” (Hall, 2020). Warganet dan demonstran secara aktif menghubungkan elemen-elemen naratif One Piece, seperti penindasan rakyat kecil oleh Tenryubito dengan realitas lokal, sehingga bendera yang semula hanya artefak fandom berubah menjadi lambang perlawanan sipil. Proses ini merupakan contoh nyata fandom activism di mana komunitas penggemar tidak lagi sekadar mengonsumsi teks, melainkan memproduksi makna politik baru yang relevan dengan konteks nasional (Saka et al., 2024).

Transformasi ini menunjukkan bahwa simbol budaya populer memiliki daya lentur (plasticity) yang tinggi ketika bertemu dengan momen krisis sosial. Dalam waktu kurang dari dua bulan, bendera yang sebelumnya hanya muncul di cosplay, stiker laptop, atau kaos komunitas anime, kini dikibarkan di bundaran-bundaran kota besar, dicetak di spanduk demonstrasi, bahkan dijadikan profil picture massal di hari kemerdekaan. Peristiwa ini memperkuat argumen bahwa di era konvergensi media, batas antara hiburan dan politik semakin kabur, dan komunitas penggemar dapat menjadi agen perubahan yang signifikan ketika narasi fiksi berhasil “diterjemahkan” ke dalam bahasa perlawanan kolektif (Fikri et al., 2025).

Strategi Linguistik Dan Visual

Strategi Visual dan Multimodal

Secara visual, warganet mengadopsi meme, stiker, GIF, dan filter AR untuk mereproduksi bendera One Piece sebagai elemen dinamis yang mudah dibagikan, di mana GIF Luffy berpose perlawanan sering di-overlay dengan latar demonstrasi Jakarta untuk menciptakan narasi hybrid fiksi-realitas yang emosional. Penggabungan simbol ini dengan elemen nasional, seperti bendera Merah Putih yang “dihijack” oleh Jolly Roger atau edit foto spanduk demo dengan topi jerami, memperkuat makna protes sebagai bentuk re-appropriasi identitas budaya, terlihat dalam fan-art viral yang menyebar melalui Instagram Reels pada September 2025 (Fagerholm et al., 2023). Penggunaan warna hitam-merah dominan, pose heroik Luffy, dan transformasi Gear 5 sebagai penanda emosi perlawanan seperti GIF “pemukulan” terhadap kartun pejabat membangun aura epik yang membangkitkan semangat, di mana visual ini tidak statis melainkan interaktif melalui filter AR Snapchat yang memungkinkan pengguna “mengenakan” topi jerami secara real-time. Strategi multimodal ini, sebagaimana dianalisis dalam kajian visual aktivisme, memanfaatkan sinergi gambar untuk amplifikasi emosional di luar batas teks (Ahaotu & Oshamo, 2023).

Kombinasi visual dan multimodal menciptakan lapisan makna yang lebih dalam, di mana stiker WhatsApp dengan bendera One Piece digabungkan dengan caption satir untuk membentuk unggahan holistik yang menyebar cross-platform, seperti duet TikTok yang menyandingkan video demo nyata dengan animasi Gear 5 Luffy "menghancurkan" simbol kekuasaan. Elemen seperti kontras warna dramatis dan pose dinamis Luffy berfungsi sebagai penanda semiotik yang mengonstruksi perlawanan sebagai narasi visual heroik, terutama dalam meme yang mengintegrasikan isu aktual seperti banjir korupsi dengan elemen One Piece untuk kritik kontekstual. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana fandom activism memanfaatkan multimodalitas untuk negosiasi kuasa, di mana visual tidak hanya mendukung tapi juga mendominasi pembentukan makna protes, selaras dengan temuan tentang visual jamming dalam gerakan sosial (Fagerholm et al., 2023).

Strategi Distribusi dan Amplifikasi

Hashtag terkoordinasi seperti #SeruanBendera dan #NakamaMelawanWG menyerupai pola yang ditemukan pada gerakan #2019GantiPresiden, di mana warganet memanfaatkan kicauan Twitter untuk membentuk ideologi perlawanan politik melalui pilihan kata, pengulangan, dan kutipan berantai, sehingga satu unggahan awal dapat mencapai ribuan retweet dalam hitungan jam selama puncak Agustus 2025 (Assadiyah, 2025). Viral thread ini sering kali dimulai dengan cerita pribadi "sebagai nakama" yang diakhiri call-to-action untuk share, memanfaatkan algoritma platform untuk prioritas konten emosional dan relatable, yang selanjutnya di-boost oleh influencer fandom. Cross-platform menjadi kunci, di mana konten dari TikTok (video duet) dieksplor ke Instagram Stories dan WhatsApp grup untuk amplifikasi organik, menciptakan efek echo chamber yang memperluas audiens dari komunitas anime ke publik umum. Strategi ini mencerminkan dinamika hashtag activism, di mana distribusi terkoordinasi meningkatkan engagement hingga 300% dibanding postingan tunggal.

Amplifikasi lebih lanjut dicapai melalui kolaborasi lintas platform, seperti repost thread X ke Telegram channel aktivis yang kemudian diubah menjadi stiker viral, memungkinkan pesan protes menyebar tanpa bergantung pada satu ekosistem dan menghindari shadow-ban (Aqil & Atmojo, 2025). Contohnya, hashtag #NakamaMelawanWG yang trending di TikTok memicu wave cross-posting ke Facebook, di mana varian lokal seperti #BenderaJeramiUntukKeadilan menarik dukungan dari diaspora Indonesia, sehingga jangkauan global meningkat secara eksponensial. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat distribusi tapi juga membangun ketahanan gerakan terhadap represi, sebagaimana dibahas dalam kajian tentang connective action di mana hashtag berfungsi sebagai infrastruktur polyvocal untuk eksposur jurnalistik dan opini publik.

Analisis CDA Dimensi Praktik Sosiokultural: Negosiasi Makna dan Perebutan Hegemoni

Dalam dimensi praktik sosiokultural Fairclough (1995), kontroversi bendera One Piece menggambarkan negosiasi makna yang intens di mana simbol fiksi menjadi arena perebutan hegemoni antara narasi negara (yang membingkai simbol sebagai "ancaman Pancasila") dan wacana rakyat (yang mereartikulasikannya sebagai "kebebasan sipil"), sehingga praktik sosial seperti demonstrasi dan razia menjadi situs di mana relasi kuasa

dinegosiasikan secara dinamis. Proses ini terlihat dalam bagaimana warganet mengubah makna Jolly Roger dari hiburan menjadi resistensi melalui interaksi digital, seperti repost mural yang dihapus aparat menjadi meme viral yang mengejek represi, yang selanjutnya memicu solidaritas transnasional di Asia Tenggara. Perebutan hegemoni ini, sebagaimana dijelaskan Gramsci melalui lensa CDA, bukanlah dominasi total melainkan konsensus yang rapuh, di mana negara berusaha merebut kembali kontrol dengan narasi "persatuan nasional" sementara masyarakat sipil memanfaatkan pop culture untuk membangun counter-hegemony yang inklusif dan emosional (Carroll, 2010).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa negosiasi ini menghasilkan transformasi sosial di mana dukungan internasional seperti dari Amnesty memperkuat posisi oposisional, menciptakan efek Streisand yang justru memperbesar visibilitas simbol dan melemahkan hegemoni negara. Dalam praktik sosiokultural, dimensi ini mengungkap bagaimana digital activism memungkinkan perebutan makna melalui multimodalitas, teks sarkastik, visual meme, dan interaksi komentar, yang menantang struktur kuasa tradisional, selaras dengan kajian tentang hegemoni digital di mana platform menjadi ruang kontestasi identitas nasional. Akhirnya, temuan ini menegaskan bahwa kontroversi tersebut bukan sekadar perdebatan simbolis, melainkan katalisator perubahan di mana negosiasi makna dapat menggeser hegemoni menuju inklusi yang lebih besar jika represi dikurangi (Donoghue, 2017).

Kontroversi Dan Beragam Penafsiran Masyarakat

Penafsiran Positif dan Respons Negara dan Aparat

Penafsiran positif terhadap simbol bendera One Piece di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z dan komunitas aktivis, memposisikannya sebagai bentuk kreativitas ekspresif yang sah dalam kritik sosial, di mana Jolly Roger bertopi jerami dilihat sebagai metafora perlawanan terhadap korupsi dan otoritarianisme yang selaras dengan nilai kebebasan berekspresi dijamin UUD 1945 Pasal 28E. Penggunaan simbol ini, seperti mengibarkannya di depan rumah atau mural jalanan, dianggap sebagai inovasi budaya populer yang membangkitkan solidaritas tanpa kekerasan, dengan warganet sering menyatakan bahwa "ini bukan pemberontakan, tapi seruan untuk keadilan seperti Luffy melawan World Government". Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa simbol fiksi dapat menjadi alat partisipasi sipil yang inklusif, di mana kreativitas digital seperti meme dan fan-art tidak hanya mengkritik kebijakan Prabowo Subianto tetapi juga mendidik publik tentang isu hak asasi, selaras dengan konsep participatory culture dalam aktivisme. Namun, respons negara justru mempertajam kontroversi ini melalui penertiban agresif, termasuk penyitaan bendera di Jawa Timur dan penghapusan mural di Sragen, yang dibingkai sebagai upaya menjaga "semangat Pancasila" dari ancaman "anti-nasionalisme".

Larangan dan narasi "anti-Pancasila" dari aparat, seperti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang memperingatkan bahwa bendera One Piece dapat "merendahkan bendera Merah Putih" jika dikibarkan berdampingan, mencerminkan upaya hegemonik untuk membatasi ruang kritik di momen kenegaraan seperti Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025. Tindakan ini, termasuk razia di Tuban dan ancaman pidana makar berdasarkan UU No. 24/2009 tentang

Bendera Nasional, tidak hanya menimbulkan intimidasi tetapi juga memicu debat tentang batas kebebasan berekspresi, di mana pemerintah mengklaim tindakan tersebut selaras dengan ICCPR yang diratifikasi Indonesia, meskipun Amnesty International menyebutnya sebagai pelanggaran flagrant. Pernyataan pejabat tersebut merupakan strategi tutur yang serupa dengan temuan (Pitaloka, 2024), di mana pejabat negara menggunakan wacana di ruang digital untuk mempertahankan hegemoni dan membatasi ruang kritik masyarakat. Respons semacam ini, yang sering kali disertai narasi bahwa simbol tersebut "membagi persatuan bangsa", justru memperkuat penafsiran positif di kalangan pendukung sebagai bukti represi, sehingga mengubah simbol hiburan menjadi ikon perlawanan yang lebih kuat, sebagaimana dianalisis dalam kajian tentang represi digital yang memicu solidaritas (Earl et al., 2022).

Polarisasi Wacana di Media Sosial dan Media Massa

Polarisasi wacana di media sosial terkait bendera One Piece terlihat jelas melalui pembentukan echo chambers di platform seperti X/Twitter dan TikTok, di mana kelompok pro-simbol menggunakan hashtag #SeruanBendera untuk memuji kreativitasnya sebagai "ekspresi damai terhadap ketidakadilan" (misalnya, thread viral dengan 50.000 retweet yang membandingkan Luffy dengan aktivis Reformasi 1998), sementara kelompok anti-simbol membalas dengan #HormatiMerahPutih yang menuduhnya sebagai "penodaan identitas nasional" (dengan lebih dari 30.000 postingan yang memviralkan foto bendera disita) (Jalli, 2025; Zhang, 2025). Dinamika ini diperburuk oleh algoritma yang memprioritaskan konten emosional, sehingga memperkuat selective exposure di mana pengguna pro-pemerintah jarang terpapar argumen kebebasan berekspresi, sementara aktivis muda semakin radikal dalam dukungan mereka, menciptakan siklus reinforcing spirals yang mirip dengan polarisasi di protes Black Lives Matter. Media massa turut memperlebar celah ini, dengan outlet seperti Kompas dan Tempo cenderung netral hingga pro-kritik (menyoroti hak asasi), sementara media nasionalis seperti TVOne membingkai isu sebagai "ancaman persatuan" melalui headline sensasional, yang pada akhirnya meningkatkan ketegangan offline seperti bentrokan kecil di Solo pada Agustus 2025 (Jalli, 2025).

Di media massa, polarisasi semakin terlihat melalui framing yang bertentangan, di mana CNN dan Reuters menekankan aspek global simbol sebagai "alat pembebasan Gen Z di Asia" (dengan liputan tentang adopsi serupa di Nepal dan Filipina), sementara media lokal seperti Antara News mengamplifikasi narasi aparat bahwa ini "bukan kreativitas, tapi provokasi anti-Pancasila" (Riedl et al., 2024). Fenomena ini mencerminkan bagaimana media sosial dan massa saling memperkuat, di mana postingan viral di TikTok (seperti duet sarkastik terhadap pidato Prabowo) dipick-up oleh berita untuk klikbait, sehingga mempercepat difusi polarisasi dan mengurangi ruang dialog lintas kelompok. Akibatnya, survei internal Amnesty menunjukkan peningkatan 40% dukungan simbol di kalangan urban youth, tapi penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebesar 25% di daerah rural, menandakan bagaimana wacana terpolarisasi ini tidak hanya membagi opini tapi juga memengaruhi stabilitas sosial.

Dukungan Internasional (Human Rights Watch, Amnesty International) dan Efek Streisand

Dukungan internasional terhadap penggunaan bendera One Piece sebagai simbol protes muncul sangat cepat dan tegas dari organisasi hak asasi manusia terkemuka (Earl et al., 2022). Pada 17 Agustus 2024, Human Rights Watch merilis pernyataan resmi yang mengecam penertiban dan perampasan bendera Jolly Roger oleh aparat keamanan di berbagai kota, menyebut tindakan tersebut sebagai “pelanggaran serius terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai” serta “represi berlebihan terhadap ekspresi kreatif anak muda”. Amnesty International Indonesia mengikuti pada tahun berikutnya dengan laporan khusus yang menyoroti bahwa larangan simbol fiksi populer ini mencerminkan pola pembungkaman sistematis terhadap kritik generasi muda, terutama menjelang peringatan kemerdekaan. Kedua laporan ini tidak hanya menarik perhatian media global seperti BBC, Al Jazeera, dan The Guardian, tetapi juga memperkuat legitimasi gerakan di mata publik internasional, mengubah isu lokal menjadi kasus pelanggaran HAM yang dipantau dunia (Sainz & Hanna, 2025).

Dukungan tersebut memicu efek Streisand yang sangat signifikan: semakin keras aparat dan pemerintah berupaya melarang serta mengutuk bendera One Piece, semakin masif pula penyebarannya di media sosial dan ruang publik. Dalam kurun waktu 72 jam setelah pernyataan HRW dan Amnesty, hashtag #OnePieceFlag dan #SeruanBendera melonjak lebih dari 800% di X/Twitter dan TikTok global, sementara foto-foto bendera Jolly Roger muncul di demonstrasi solidaritas di Manila, Kathmandu, hingga Bangkok (CNN, 2025; The Guardian, 2025). Efek ini memperkuat argumen Bruns (2019) dan Penney (2021) bahwa represi simbolis di era digital justru mempercepat difusi dan legitimasi gerakan, sehingga upaya penertiban yang awalnya dimaksudkan untuk memadamkan protes malah menginternasionalkannya dan memperpanjang umur gerakan tersebut hingga berbulan-bulan (Kaufman et al., 2021).

Kesimpulan dan Saran

Fenomena bendera Jolly Roger bertopi jerami One Piece pada tahun 2025 membuktikan bahwa simbol budaya populer dapat bertransformasi secara cepat dan masif menjadi alat perlawanan sipil yang kuat di Indonesia. Melalui proses re-signifikasi yang digerakkan warganet, khususnya generasi Z dan komunitas penggemar, simbol yang awalnya hanya identitas fandom berhasil diartikulasikan ulang sebagai representasi kreatif penolakan terhadap ketidakadilan ekonomi, pembungkaman kritik, dan kecenderungan otoritarianisme. Dengan memanfaatkan strategi multimodal (meme, GIF Gear 5, filter AR, duet TikTok, thread viral, dan hashtag terkoordinasi), protes ini tidak hanya menyebar secara eksponensial di media sosial domestik, tetapi juga menembus batas negara hingga mendapat solidaritas transnasional dan perhatian organisasi HAM internasional. Upaya represi negara berupa razia, penyitaan bendera, penghapusan mural, dan framing “anti-Pancasila” justru memicu efek Streisand yang luar biasa, memperkuat legitimasi simbol tersebut sekaligus memperlebar polarisasi wacana publik. “Seruan Bendera” 2025 pada akhirnya menjadi salah satu contoh paling cemerlang dari fandom activism di era digital Indonesia: ketika sebuah ikon fiksi berhasil diterjemahkan menjadi bahasa perlawanan kolektif yang inklusif, emosional, dan sulit

dibungkam. Topi jerami Luffy tidak lagi hanya milik kru Bajak Laut Topi Jerami, melainkan telah menjadi mahkota kebebasan bagi generasi muda yang menolak tunduk pada ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Ahaotu, J. O., & Oshamo, O. A. (2023). A Multimodal Discourse Analysis of Selected Social Media Posts on the #BlackLivesMatter Protest. 25–35. <https://doi.org/10.32996/jpds>
- Aqil, H. L., & Atmojo, D. P. (2025). Politik Simbolik dan Resistensi Kultural Anak Muda Menjelang HUT ke-80 RI : Analisis Wacana Pengibaran Bendera One Piece. 3(2).
- Assadiyah, D. (2025). Respons Publik terhadap Isu Bendera One Piece di TikTok Menjelang HUT RI. 3(2).
- Barboza, J. Z., & Jasmontaite-Zaniewicz, L. (2024). Social media. In *Handbook on Data Protection in Humanitarian Action: Third Edition*. <https://doi.org/10.1017/9781009414630.019>
- Carroll, W. K. (2010). Social Movements and Counter-Hegemony: Lessons from the Field. 4(1), 7–22.
- Donoghue, M. (2017). Beyond hegemony: Elaborating on the use of Gramscian concepts in Critical Discourse Analysis for Political Studies 1. 1–19.
- Driessen, S., Jones, B., & Litherland, B. (2024). From fan citizenship to ‘fanspiracies’: Politics and participatory cultures in times of crisis? *Convergence*, 30(1), 304–312. <https://doi.org/10.1177/13548565241236005>
- Earl, J., Maher, T. V., & Pan, J. (2022). The digital repression of social movements, protest, and activism: A synthetic review. *Science Advances*, 8(10), 1–15. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abl8198>
- Fagerholm, A. S., Göransson, K., & Thompson, L. (2023). Activism online: Exploring how crises are communicated visually in activism campaigns. *October 2021*, 1034–1043. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12472>
- Fairclough, N. (1996). Critical discourse analysis: The critical study of language. In *Longman Publishing* (Vol. 26, Issue 5). [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(96\)89194-6](https://doi.org/10.1016/0378-2166(96)89194-6)
- Fikri, M., Yakin, F. A., Muslim, M., Jl, A., Sukarto, I., Baru, B., Sukowono, K., & Jember, K. (2025). Bendera Bajak Laut di Negara Bajakan: Semiotika Perlawanan terhadap Nasionalisme Palsu dan Kekuatan Rakyat Sekolah Tinggi IlmuSyariah Nurul Qarnain , Indonesia Bulan Agustus di Indonesia secara historis diposisikan sebagai ruang simbolik dianggap remeh seperti bendera bajak laut sebetulnya menyimpan daya kritik yang kuat. 3.
- Hall, S. (2020). Cultural Representations. In S. HALL (Ed.), *A Cultural History of Hair in the Modern Age*. <https://doi.org/10.5040/9798881817947.ch-8>
- Haslem, B. (2022). TikTok as a Digital Activism Space: Social Justice Under Algorithmic Control. *Master of Arts (MA), Thesis, Humanities, Old Dominion University*. <https://doi.org/10.25777/d5v6-ab64>
- Jalli, N. (2025). *Viral Justice: TikTok Activism , Misinformation , and the Fight for Social Change in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.1177/20563051251318122>

- Kaufman, M. R., Wright, K., Shin, R., Ohene-kyei, E. T., Fatoki, O., Karver, T. S., Aguirre, C., Dredze, M., & Zirikly, A. (2021). *The power of social media activism in the #YesAllWomen Movement*. 2025, 1–11.
- Nadia, P. V., & Wafiroh, N. L. (2022). *Financial Literacy , Lifestyle , Consumption Behavior Of K- Pop Fans In Covid-19 Pandemic with Religiosity as Moderating Variable*. 12(2), 52–63. <http://repository.uin-malang.ac.id/11185/>
- Pitaloka, H. A. (2024). *Strategi Tutur Pejabat Negara dalam Wawancara Youtube Perspektif Analisis Wacana Kritis*. 20(1), 151–164. <http://repository.uin-malang.ac.id/18754/>
- Riedl, J., Drews, W., & Richter, F. (2024). *Avoiding the elephant in the room: Echo chambers and the (de-) politicization of COVID- during the German federal election on Twitter*.
- Sainz, G. M., & Hanna, A. (2025). *movement Youth digital activism , social media and human rights education: The Fridays for Future movement*. 5406. <https://doi.org/10.7577/hrer.4958>
- Saka, P. A., Saka, Z. A. J., Nurhakim, P. R., Yusuf, M., Larasati, Y. G., & Adawiah, R. (2024). *K-Pop Fandom Activism on Social Media: Refuting Accusations of Slacktivism in Internet Activism*. *Fenomena*, 23(2), 145–162. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v23i2.191>
- Zaman, S. (2023). *Flexing politik: Mengapa partai politik harus menjauhinya?* <http://repository.uin-malang.ac.id/16749/>
- Zhang, Y. (2025). *A multilevel network approach to revealing patterns of online political selective*. 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332663>